



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : R.AGUNG PAMBUDI
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 454762

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 933.750.000

1. Tanah Seluas 369 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/110 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 498.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/49 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 55.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. LAINNYA, MTB SEPEDA THRILL Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT H1B02N42L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.028.650.000
III. HUTANG	Rp.	83.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	945.650.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.